

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peningkatan pertumbuhan penduduk terjadi di hampir seluruh negara di dunia. Hal ini terbukti dengan jumlah populasi global yang mencapai 8,16 miliar jiwa pada tahun 2024. Indonesia sendiri menempati posisi sebagai negara terpadat keempat di dunia, dengan jumlah penduduk mencapai 283,49 juta jiwa. Tingginya kepadatan penduduk ini menempatkan Indonesia dalam lima besar negara dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Peningkatan jumlah penduduk membawa berbagai konsekuensi, salah satunya adalah tekanan terhadap lingkungan. Perubahan fungsi lahan, seperti alih fungsi hutan menjadi permukiman, serta berbagai aktivitas manusia lainnya telah menyebabkan permasalahan lingkungan yang kompleks. Salah satu isu lingkungan yang masih menjadi perhatian serius pemerintah adalah persoalan sampah. Pertumbuhan jumlah penduduk sejalan dengan banyaknya limbah sampah yang dihasilkan. Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesehatan masyarakat serta meningkatkan kualitas lingkungan.

Menurut Rahim (2020), pengelolaan sampah yang efektif dan efisien memerlukan dukungan dari regulasi yang kuat dan jelas. Regulasi umum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan regulasi teknis ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Di Indonesia, isu pengelolaan sampah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mengelola sampah, antara lain dengan meningkatkan

kesadaran masyarakat, memfasilitasi upaya pengurangan dan penanganan sampah, serta mengkoordinasikan berbagai pihak seperti lembaga pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta agar selaras dengan pengelolaan sampah. Selain itu, dalam pasal 7 menegaskan bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah untuk bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan sampah sesuai dengan keadaan di daerah masing-masing.

Permasalahan sampah merupakan permasalahan yang sangat krusial jika tidak ditangani dengan benar. Permasalahan terkait sampah tersebut bahkan dapat dikatakan sebagai permasalahan yang kultural termasuk permasalahan sampah plastik di kota-kota besar di Indonesia (Puspitaningrum, 2021). Pada era globalisasi ini, kemajuan industri dan teknologi membawa dampak besar terhadap kehidupan manusia, salah satunya ialah meningkatnya produksi dan konsumsi plastik. Sampah padat anorganik seperti kantong plastik, tergolong *non-biodegradable* atau tidak dapat terurai oleh *mikroorganisme*. Plastik merupakan sumber penghasil sampah yang berdampak besar terhadap ekosistem makhluk hidup dan mendistribusikan polutan lain di dalam lingkungan (Andrianto, 2022). Sebagian besar masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari penggunaan kantong plastik. Kantong plastik menjadi bahan yang penting dan sering digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti tempat minuman, pembungkus makanan, atau wadah belanjaan. Plastik dipilih karena sifatnya yang ringan, tidak mudah pecah, murah, dan mudah diperoleh. Penggunaan kantong plastik telah menjadi kebutuhan masyarakat, didukung oleh berbagai produsen yang menawarkan kantong plastik dengan

kualitas yang bervariasi namun tetap terjangkau. Namun, meningkatnya penggunaan kantong plastik tidak diimbangi dengan kemampuan dan sarana daur ulang yang memadai, sehingga menimbulkan penumpukan sampah plastik yang berdampak negatif bagi lingkungan, karena plastik membutuhkan waktu lama untuk terurai.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan sekitar 68,5 juta ton sampah per tahun, dengan sekitar 17% diantaranya merupakan sampah plastik. Sampah plastik, dengan sifatnya yang sulit terurai secara alami, berpotensi mencemari tanah, perairan, dan berdampak negatif terhadap kehidupan berbagai organisme. Jika tidak ditangani dengan serius, akumulasi sampah plastik ini dapat memperburuk perubahan iklim melalui emisi gas rumah kaca dari proses pembakaran terbuka maupun dekomposisi di tempat pembuangan akhir (TPA). Di tengah upaya Indonesia untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya poin ke-13 tentang *Climate Action* (Penanganan Perubahan Iklim) dan poin ke-15 tentang *Life on Land* (Menjaga Ekosistem Daratan), persoalan sampah plastik menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pengelolaan yang efektif berkelanjutan disertai dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak negatif penggunaan plastik. Selain itu, penerapan kebijakan pengurangan penggunaan plastik juga sangat diperlukan. Mengatasi permasalahan sampah plastik tidak hanya penting untuk menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga untuk melindungi kesehatan manusia dan menjamin kelestarian ekonomi.

Tabel 1. 1 Jumlah Produksi Penghasil Sampah Plastik Dunia Per Tahun

No	Negara	Jumlah Sampah plastik
1.	India	9.275.777 ton per tahun
2.	Nigeria	3.532.479 ton per tahun
3.	Indonesia	3.352.229 ton per tahun
4.	China	2.808.179 ton per tahun
5.	Pakistan	2.567.461 ton per tahun
6.	Bangladesh	1.748.215 ton per tahun
7.	Rusia	1.702.453 ton per tahun
8.	Brazil	1.444.824 ton per tahun
9.	Thailand	995. 718 ton per tahun

Sumber:

Berdasarkan data diatas, Indonesia berada di peringkat ketiga setelah Nigeria sebagai negara penyumbang sampah plastik. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 80% sampah di laut berasal dari daratan, dan 90% di antaranya adalah sampah plastik. Sampah kantong plastik di perairan Indonesia diperkirakan mencapai 187,2 juta ton per tahun (Jambeck dkk, 2015). Sampah plastik memerlukan waktu 200 hingga 1.000 tahun untuk terurai, dan penggunaan PCB (*Polychlorinated Biphenyls*) dalam pembuatan plastik menyebabkan plastik ini tetap berbahaya bahkan ketika dimakan oleh hewan dan tumbuhan, karena menjadi racun (Wibowo dalam Purwaningrum, 2016). Saat ini, masalah terbesar yang dihadapi indonesia adalah sampah plastik, dan hingga kini belum ada solusi yang efektif untuk mengatasinya. Masyarakat perlu berpartisipasi dalam mengurangi sampah kantong plastik yang berbahaya dan sulit terurai dengan mencari solusi yang memberikan dampak positif. Sayangnya, banyak orang masih

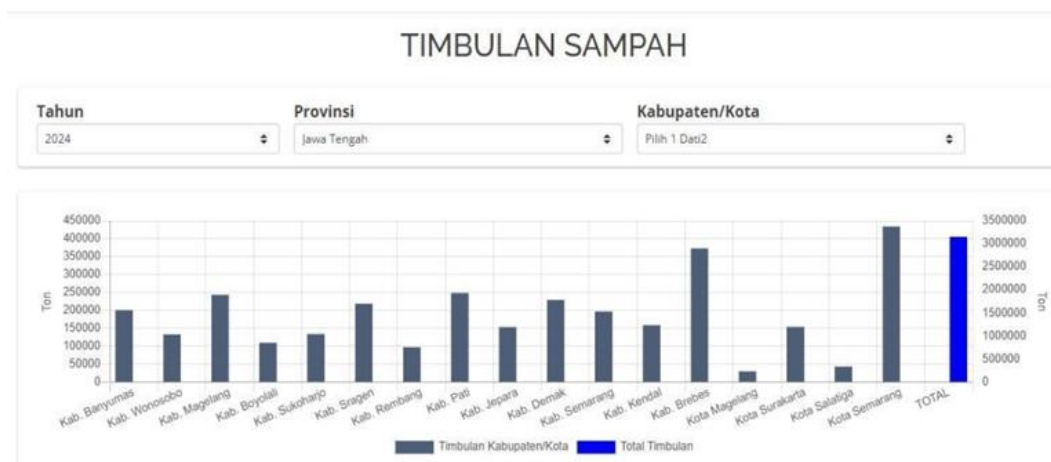
menganggap sampah plastik sebagai barang tak berguna setelah dipakai. Pengelolaan sampah saat ini masih menggunakan pendekatan "*end of pipe*", di mana sampah hanya dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah dengan tingkat produksi sampah tertinggi di Indonesia, dengan estimasi timbulan sampah mencapai sekitar 6,38 juta ton per tahun. Data pada tahun 2022 menunjukkan produksi sampah di Jawa Tengah sebesar 5,76 juta ton, yang menyumbang 16,03% dari total sampah nasional. Tingginya volume sampah ini didorong oleh pertumbuhan penduduk yang pesat dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin intensif, terutama di kawasan perkotaan. Hal ini menimbulkan tantangan besar dalam pengelolaan sampah, mengingat laju akumulasi sampah harian yang diperkirakan mencapai jutaan ton, namun kapasitas pengelolaannya baru mampu menangani sekitar 62,97%, sehingga masih terdapat sebagian besar sampah yang belum dikelola secara optimal.

Pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) di Jawa Tengah menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan, dimana sebagian besar TPA, sekitar 37 dari 46 lokasi, mengalami kondisi *overload* atau kelebihan kapasitas. Fenomena ini menyebabkan darurat sampah yang berpotensi menimbulkan dampak negatif baik bagi lingkungan maupun kesehatan masyarakat sekitar. Di beberapa kabupaten, seperti Pemalang, penumpukan sampah yang tidak tertangani dengan baik telah menimbulkan keresahan sosial akibat bau, penyebaran penyakit, serta pencemaran lingkungan. Kondisi ini diperparah oleh masih banyaknya TPA yang menerapkan

metode open dumping yang tidak ramah lingkungan, disebabkan keterbatasan anggaran serta infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai. Sampah plastik, yang dominan dalam komposisi timbulan, menjadi persoalan besar karena sifatnya yang sulit terurai dan berpotensi mencemari sumber daya alam.

Gambar 1. 1 Jumlah Timbulan Sampah



Sumber; Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2024

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa Kota Semarang merupakan daerah dengan penghasil sampah tertinggi di Jawa Tengah. Kota Semarang menghasilkan timbulan sampah harian sebesar kurang lebih 1.229 ton, dengan estimasi sekitar 13% merupakan sampah plastik. Fenomena ini diperparah oleh pola konsumsi masyarakat perkotaan yang tinggi terhadap produk berbahan plastik sekali pakai, seperti kantong plastik, kemasan makanan, dan botol minuman. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap dampak jangka panjang sampah plastik terhadap lingkungan, ditambah dengan lemahnya pengawasan dan penegakan regulasi, menyebabkan volume sampah plastik terus bertambah dan pengelolaannya menjadi tidak optimal. Sampah plastik yang tidak tertangani dengan baik menumpuk di sungai, saluran drainase, dan kawasan pesisir,

menyebabkan terjadinya banjir, pencemaran air tanah, serta degradasi kualitas lingkungan hidup di sekitarnya. Menurut Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, setiap tahunnya produksi sampah di Kota Semarang mengalami kenaikan hingga 1,5% tiap tahunnya. Menurut data Capaian Jakstrada, Kota Semarang menghasilkan timbulan sampah sekitar 1,276 ton perhari dan 1.071 ton dikirim ke TPA Jatibarang. Selama 3 tahun terakhir, jumlah timbulan sampah di Kota Semarang terus mengalami peningkatan. Penduduk Kota Semarang yang mencapai 2 juta jiwa lebih menyebabkan produksi sampah setiap harinya mencapai 1.200 ton. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang memproyeksi jumlah timbulan sampah akan mengalami kenaikan hingga tahun 2046. Jumlah penduduk yang meningkat menyebabkan adanya peningkatan kegiatan baik jasa, industri maupun bisnis di sebagian wilayah di Kota Semarang. Asisten bidang pemerintahan kota semarang, Muhammad Khadija, mengatakan jutaan warga yang hidup di kota semarang setidaknya menghasilkan sampah hingga 120 ton sampah plastik di setiap harinya.

Berdasarkan perspektif perubahan iklim, akumulasi sampah plastik di Kota Semarang berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca. Proses pembakaran sampah plastik, yang masih sering dilakukan secara terbuka di berbagai kawasan permukiman, melepaskan karbon dioksida (CO_2), metana (CH_4), dan zat berbahaya lainnya ke atmosfer. Hal ini berdampak langsung terhadap peningkatan suhu lokal dan perubahan pola cuaca, memperparah dampak perubahan iklim di kawasan perkotaan. Sejalan dengan itu, keberadaan sampah plastik di habitat darat dan pesisir juga mengancam keanekaragaman hayati yang

menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Flora dan fauna lokal, khususnya spesies endemik di wilayah pesisir Semarang dan hutan mangrove, terancam akibat pencemaran plastik yang mengganggu habitat alami mereka. Kondisi ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara permasalahan sampah plastik dengan upaya pencapaian SDGs poin 15, yang menekankan pentingnya perlindungan, restorasi, dan penggunaan berkelanjutan ekosistem darat. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Petronella (2020), peningkatan volume sampah di berbagai wilayah, termasuk Kota Semarang, disebabkan oleh sejumlah faktor struktural dan sosial yang saling terkait, seperti pertumbuhan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, serta perkembangan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan populasi yang pesat berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah limbah domestik, sehingga memberikan tekanan yang signifikan terhadap sistem pengelolaan lingkungan kota. Selain itu, perubahan gaya hidup masyarakat, yang dipengaruhi oleh peningkatan daya beli dan akses terhadap berbagai produk berbasis teknologi, memperparah akumulasi limbah, khususnya limbah plastik sekali pakai yang sulit terurai secara alami. Kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi produk instan dan kemasan praktis menyebabkan terjadinya perubahan dalam karakteristik sampah yang dihasilkan, dengan proporsi plastik yang semakin dominan. Di sisi lain, ekspansi usaha dan kegiatan ekonomi yang menopang pertumbuhan Kota Semarang turut berkontribusi pada kuantitas dan kompleksitas sampah yang dihasilkan, baik dari sektor perdagangan, industri, maupun jasa.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh tingginya penggunaan plastik, Pemerintah Kota Semarang menginisiasi langkah strategis melalui penerbitan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik merupakan bentuk konkret dari komitmen pemerintah daerah dalam menanggapi isu lingkungan yang disebabkan oleh tingginya konsumsi plastik sekali pakai di wilayah perkotaan. Peraturan ini dirancang sebagai instrumen hukum yang bertujuan untuk menekan volume limbah plastik, mendorong transformasi perilaku konsumsi masyarakat dan pelaku usaha, serta memperkuat tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Dalam peraturan ini memberikan definisi yuridis terhadap sejumlah istilah teknis, seperti kantong plastik, styrofoam, dan bahan alternatif ramah lingkungan. Kejelasan definisi ini bertujuan untuk membangun kerangka kerja normatif yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Kebijakan ini menekankan peran aktif Pemerintah Kota Semarang dalam menjalankan fungsi regulatif dan fasilitatif, melalui penyusunan kebijakan, strategi pelaksanaan, dan pembinaan teknis kepada pelaku usaha serta masyarakat umum. Bentuk intervensi kebijakan yang dimaksud antara lain berupa sosialisasi, pelatihan, konsultasi publik, dan penyediaan dukungan teknologi alternatif yang mendukung pengurangan penggunaan plastik. Adapun pada peraturan ini menetapkan larangan eksplisit terhadap penggunaan plastik sekali pakai oleh pelaku usaha, termasuk pusat perbelanjaan, restoran, hotel, dan gerai makanan dan minuman. Pelaku usaha diwajibkan mengganti plastik dengan bahan yang lebih ramah lingkungan, seperti kantong kain, pipet berbahan

logam atau kertas, serta wadah makanan *biodegradable*. Namun demikian, peraturan ini tetap memperhatikan aspek pragmatis dengan memberikan pengecualian pada jenis plastik yang secara teknis belum dapat digantikan, terutama untuk kebutuhan tertentu yang bersifat medis atau fungsional.

Sebagai instrumen pengendalian, peraturan ini mengatur pula sanksi administratif bagi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin operasional. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota dalam menegakkan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Dalam peraturan ini juga menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan kebijakan. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek, melainkan sebagai subjek aktif dalam upaya kolektif untuk mengurangi konsumsi plastik, baik melalui perubahan gaya hidup maupun keterlibatan dalam kegiatan edukatif dan pengawasan sosial. menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini dilaksanakan secara sistematis oleh dinas teknis yang berwenang, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, melalui inspeksi berkala dan sistem pelaporan masyarakat.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 18 Juni 2019, dan diundangkan dalam Berita Daerah Kota Semarang sebagai syarat formil keberlakuannya. Dengan diberlakukannya regulasi ini, Pemerintah Kota Semarang menunjukkan keseriusannya dalam mengarusutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui kebijakan yang berbasis lingkungan hidup. Meskipun demikian, efektivitas implementasi peraturan ini sangat ditentukan oleh konsistensi pengawasan, sinergi antar pemangku kepentingan, serta perubahan kesadaran

kolektif masyarakat terhadap pentingnya pengurangan konsumsi plastik sekali pakai.

Kebijakan ini bertujuan untuk menekan penggunaan plastik sekali pakai di tengah masyarakat serta mendorong adopsi alternatif ramah lingkungan dalam berbagai sektor, baik individu maupun dunia usaha. Upaya ini sejalan dengan kebutuhan mendesak untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup kota, mengingat bahwa ketidakseimbangan antara produksi sampah plastik dan kapasitas pengelolaannya dapat mengancam kualitas lingkungan perkotaan. Dengan demikian, melalui pendekatan regulatif ini, Pemerintah Kota Semarang berusaha membangun kesadaran kolektif dan mengubah perilaku konsumsi masyarakat, sebagai bagian dari strategi berkelanjutan untuk menjaga kesehatan ekosistem perkotaan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat fondasi Kota Semarang sebagai kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik merupakan instrumen penting yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan agar tetap bersih, indah, dan sehat. Peraturan ini dikeluarkan dengan tujuan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat maupun pelaku usaha dalam upaya pengendalian dan pengurangan penggunaan plastik yang tidak ramah lingkungan. Pengaturan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengelolaan sampah plastik, terutama kantong plastik, pipet plastik, dan styrofoam, telah menjadi masalah serius yang mengancam keberlanjutan lingkungan di Kota Semarang. Sampah plastik yang sulit terurai secara alami ini menyebabkan pencemaran lingkungan,

mengganggu ekosistem, serta berpotensi menimbulkan risiko kesehatan masyarakat.

Peraturan ini mengacu pada sejumlah undang-undang dan peraturan yang mendukung pengelolaan sampah sekaligus perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar yang menegaskan kewenangan daerah dalam mengatur urusan pemerintahan terkait lingkungan dan kota. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan dasar hukum bagi pengelolaan sampah secara terintegrasi, termasuk upaya pencegahan dan pengurangan limbah dari sumbernya. Kemudian, adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah turut memperkuat kedudukan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam daerah otonom.

Secara umum, peraturan ini mendefinisikan bahwa plastik merupakan polimer yang terdiri dari rantai panjang atom yang saling mengikat dan sulit terurai secara alami. Plastik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari termasuk kantong plastik, pipet minum plastik, dan styrofoam, digolongkan sebagai bahan yang perlu dikendalikan penggunaannya karena sifatnya yang tidak ramah lingkungan dan berpotensi mencemari lingkungan. Peraturan ini menegaskan bahwa pengurangan penggunaan plastik harus dilakukan secara bertahap dan penuh perhitungan, dengan upaya meminimalisasi penggunaannya secara bijaksana dan berkelanjutan. Pelaku usaha, seperti toko, restoran, hotel, dan pelaku kegiatan ekonomi lain, diharapkan tidak lagi menyediakan atau menggunakan kantong

plastik dan produk berbasis plastik yang tidak ramah lingkungan dalam kegiatan usaha mereka.

Sebagai pengganti, pelaku usaha harus menyediakan alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti kantong kain, bahan organik yang mudah terurai, atau produk pengganti lainnya yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap plastik sekali pakai. Dalam hal ini, peraturan ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap larangan penyediaan plastik tertentu akan dikenai sanksi administratif seperti teguran tertulis, paksaan dari pihak pemerintah, pembekuan izin usaha, atau bahkan pencabutan izin secara sementara. Dengan penerapan sanksi ini, diharapkan pelaku usaha menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam mendukung pengendalian penggunaan plastik.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan peraturan ini, masyarakat turut dilibatkan sebagai bagian penting dari proses pengendalian. Mereka didorong untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dan bahan berbahan plastik lainnya, serta mengganti dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, masyarakat juga diundang berperan aktif dalam sosialisasi pengendalian penggunaan plastik kepada sesama dan lingkungan sekitar agar kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan semakin meningkat. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, melalui dinas terkait yang dilimpahkan tugas pengawasan dan pengendalian oleh Walikota. Pemerintah kota melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan ini sesuai dengan yang diharapkan dan memberi efek positif dalam pengurangan limbah plastik. Pengawasan ini

dilakukan secara tegas dan berintegrasi agar peraturan dapat berjalan efektif serta benar-benar mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah plastik.

Peraturan ini mulai berlaku setelah diundangkan secara resmi dan diumumkan kepada publik melalui media formal, seperti Berita Daerah dan media komunikasi lainnya. Diharapkan, keberadaan peraturan ini dapat menjadi landasan nyata dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan di Kota Semarang. Dengan pengendalian penggunaan plastik yang lebih bijaksana dan berkelanjutan, diharapkan Kota Semarang dapat mencapai lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari, serta mampu menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola dan mengurangi limbah plastik secara efektif dan bertanggung jawab.

Mempertimbangkan kompleksitas masalah tersebut, penanganan sampah plastik di Kota Semarang perlu dipandang tidak hanya sebagai isu kebersihan dan estetika kota, tetapi juga sebagai bagian integral dari strategi mitigasi perubahan iklim dan konservasi ekosistem daratan. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, komunitas masyarakat, dan akademisi sangat diperlukan untuk mempercepat pengurangan sampah plastik, menekan emisi gas rumah kaca, serta melindungi keanekaragaman hayati lokal. Melalui pendekatan terpadu ini, Kota Semarang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs poin 13 dan poin 15, sekaligus mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan, tangguh terhadap perubahan iklim, dan ramah lingkungan,

Peraturan ini dirancang sebagai instrumen regulatif untuk membatasi konsumsi plastik sekali pakai di berbagai sektor kehidupan masyarakat, baik dalam aktivitas individu maupun dalam kegiatan usaha. Tujuan utama dari kebijakan ini

adalah untuk menekan volume limbah plastik yang dihasilkan, sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pola konsumsi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Melalui pemberlakuan peraturan ini, pemerintah daerah berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif penggunaan plastik terhadap ekosistem, serta memperkenalkan alternatif produk yang lebih ekologis, seperti penggunaan tas belanja dari bahan daur ulang atau bahan organik. Implementasi kebijakan ini tidak hanya difokuskan pada aspek pengurangan penggunaan plastik semata, tetapi juga melibatkan upaya edukasi, sosialisasi, dan pembinaan terhadap pelaku usaha agar turut serta dalam gerakan pengurangan plastik, melalui inovasi produk dan adaptasi operasional yang mendukung prinsip keberlanjutan. Dengan demikian, pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap penciptaan lingkungan perkotaan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan, serta menjadi contoh penerapan kebijakan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat di tingkat daerah.

Meskipun Peraturan Walikota No. 27 Tahun 2019 telah diberlakukan sebagai langkah strategis dalam pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang, implementasinya di tingkat lapangan masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Rendahnya tingkat kepatuhan dari pelaku usaha, keterbatasan ketersediaan fasilitas alternatif pengganti plastik, serta belum optimalnya mekanisme sanksi yang diterapkan menjadi hambatan utama dalam efektivitas kebijakan ini. Di sisi lain, upaya pengelolaan sampah yang berlandaskan prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R) juga masih memerlukan penguatan, baik dari aspek

infrastruktur pendukung maupun dari dimensi edukasi dan kesadaran lingkungan masyarakat. Kurangnya sosialisasi, infrastruktur yang belum memadai, serta resistensi dari masyarakat dan pelaku usaha turut memperbesar tantangan dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat implementasi Peraturan Walikota No. 27 Tahun 2019, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan stakeholders lainnya dalam upaya menciptakan Kota Semarang yang lebih ramah lingkungan, serta meningkatkan efektivitas kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, skripsi ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu administrasi publik, tetapi juga pada upaya pelestarian lingkungan yang lebih baik di masa depan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, berikut ini merupakan identifikasi permasalahan yang terjadi:

1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengurangi sampah kantong plastik.
2. Fasilitas sarana dan prasarana untuk pengurangan sampah plastik belum memadai.
3. Kurang optimalnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait program pengurangan sampah plastik di Kota Semarang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan dari Peraturan Wali Kota (Perwali) Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Peraturan Wali Kota (Perwali) Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimana implementasi kebijakan dari Peraturan Wali Kota (Perwali) Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik.
2. Menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Peraturan Wali Kota (Perwali) Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi tis, tetapi juga berdampak positif secara praktis dalam upaya mewujudkan Kota Semarang yang ramah lingkungan. Kegunaan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah

1.5.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang akan didapatkan dari penelitian ini antara lain:

- a. Hasil penelitian dapat digunakan oleh pemerintah Kota Semarang untuk merumuskan strategi sosialisasi yang lebih efektif dalam menyampaikan informasi mengenai peraturan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
- b. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi lembaga swadaya masyarakat dan organisasi lingkungan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengendalian penggunaan plastik dan menjaga lingkungan.
- c. Temuan dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam memperbaiki kebijakan dan infrastruktur yang mendukung implementasi pengendalian penggunaan plastik, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Hasil penelitian dapat membantu pemerintah dalam merumuskan indikator dan mekanisme monitoring yang lebih baik untuk mengevaluasi efektivitas implementasi peraturan terkait pengendalian penggunaan plastic

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/Judul/Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Judul : Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Pada Bisnis Retail Di Kabupaten Jepara Peneliti : Murdyansyah Herman, Maliki Aji Prakoso, Bambang Agus Windusancono, Muhammad Daennie Tahun : 2023	Untuk menganalisis pelaksanaan implementasi kebijakan publik yang bertujuan mengurangi penggunaan kantong plastik pada bisnis retail di Kabupaten Jepara.	yang digunakan dalam jurnal ini adalah implementasi kebijakan Publik dari Wahab (2004), yang menekankan pentingnya penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan dan realisasi praktisnya.	Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah kualitatif analisis deskriptif .	Hasil penelitian dari jurnal ini adalah kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik belum sepenuhnya maksimal karena respon masyarakat yang rendah dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan kantong plastik

No.	Peneliti/Judul/Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Judul : Kebijakan Pemerintah Tentang Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Tradisional Kota Banjarmasin Peneliti : Normajatun, Abdul Haliq Tahun : 2020	Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di pasar tradisional Kota Banjarmasin.	Jurnal tersebut mengacu pada dari Grindle (1980) dan Edward III , yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan melibatkan tindakan-tindakan yang memfasilitasi tercapainya tujuan kebijakan sebagai dampak dari aktivitas pemerintah	Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif .	Hasil penelitian dari jurnal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di pasar tradisional Kota Banjarmasin telah diimplementasikan dengan baik oleh Pemerintah Kota Banjarmasin melalui sosialisasi dan pembagian bakul purun (wadah non-plastik).
3.	Judul : Efektifitas Kebijakan Plastik Berbayar di Indonesia Dalam Upaya Pengurangan dan Pencemaran Sampah Plastik Peneliti : Ni Wayan Sintya Galuh Paramita, Amrie Firmansyah Tahun : 2024	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah kebijakan plastik berbayar telah berhasil mengubah perilaku masyarakat dalam mengurangi penggunaan kantong plastik dan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait regulasi dan	yang digunakan dalam jurnal mengenai kebijakan pengurangan kantong plastik di Banjarmasin ini mengacu pada model implementasi kebijakan dari Edward III. Model ini menekankan empat faktor kunci yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi,	Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah melalui pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif . Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, terutama dengan Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah	menyimpulkan bahwa kebijakan plastik berbayar di Indonesia masih belum sepenuhnya efektif. Meskipun telah ada regulasi dan sosialisasi, kebijakan ini belum berhasil mengubah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kantong plastik. Harga kantong plastik yang rendah (Rp200,00) dinilai tidak cukup untuk mengurangi konsumsi plastik secara signifikan.

No.	Peneliti/Judul/Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		pelaksanaan yang lebih efektif	sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin sebagai informan kunci, serta dengan satu orang penjual dan pembeli di dua pasar tradisional, yaitu Pasar Pandu dan Pasar Teluk Dalam di Kota Banjarmasin	
4.	Judul : Implementasi Peraturan Walikota (Perwal) Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik Guna Menciptakan Lingkungan Bersih Dan Sehat Di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyelenggaraan implementasi peraturan dan juga faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung penyelenggaraan implementasi peraturan	4 indikator yang digunakan untuk mengevaluasi penyelenggaraan implementasi peraturan diantaranya : 1. sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia 2. Komunikasi baik dari masyarakat umum, pelaku	Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan memiliki makna dengan fokus penelitian ini adalah penyelenggaraan implementasi peraturan waliKota Semarang nomor 27 tahun	menyimpulkan bahwa dari 4 indikator tersebut, yang menjadi kendala yaitu Kurang adanya sarana prasarana untuk menunjang keberhasilan implementasi peraturan tersebut, Kurangnya sumber daya manusia yang ada di kelurahan tambakaji kecamatan ngaliyan, sehingga sulit untuk melakukan pemantauan secara berkala

No.	Peneliti/Judul/Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Peneliti : Ira Anggita Puspitaningrum Tahun : 2021		usaha, dan pihak akademisi 3. disposisi atau tanggapan masyarakat 4. Implementing organization atau badan-badan yang bertanggungjawab	2019 di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan dan juga faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung penyelenggaraan implementasi peraturan waliKota Semarang nomor 27 tahun 2019 di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan . Penelitian kualitatif tidak akan terlepas dari keberadaan instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat sudah	sedangkan masalah yang ada begitu kompleks, dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pengurangan penggunaan plastik.

No.	Peneliti/Judul/Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				memasuki tahap pengumpulan data di lapangan. Wawancara, dokumentasi dan observasi adalah sebagian contoh instrumen penelitian kualitatif yang menjadi senjata menggali data dari sumber- sumber.	
5.	Judul : Implementasi Peraturan Walikota Semarang No 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Plastik di Kota Makassar Peneliti : Gabriel Lintang Adrianto Tahun : 2022	Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Plastik .	Model implementasi kebijakan Grindle membagi dua tahap dari implementasi kebijakan. Pertama adalah Content Policy yang berfokus pada proses politik yang terjadi dalam kebijakan publik. Content Policy merupakan tahap krusial dimana hasil dari	menggunakan metode dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode tersebut diharapkan dapat mengetahui bagaimana implementasi dari Perwal	Perwal Pengendalian Plastik belum bisa untuk diterapkan di Kota Semarang. Tidak adanya produk substitusi plastik sekali pakai yang murah dan ramah lingkungan membuat para pelaku usaha kesulitan untuk mengikuti aturan ini. Untuk menunjang keberhasilan kebijakan ini, Pemerintah Kota Semarang harus bisa menyediakan infrastruktur penunjang seperti pembentukan

No.	Peneliti/Judul/Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			Content Policy berpengaruh kepada Context Policy. Context <i>Policy</i> adalah proses administrasi kebijakan yang berfokus pada bagaimana implementor kebijakan dalam melaksanakan kebijakan	Pengendalian Plastik oleh Pemerintah Kota Semarang yang sudah berjalan selama hampir tiga tahun sehingga dalam proses pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam dengan narasumber yang bertujuan untuk melihat objek penelitian secara natural dan apa adanya. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Sugiyono (2019) bahwa metode penelitian kualitatif bertujuan untuk	satuan kerja, penyediaan produk substitusi yang murah, sistem pendataan yang memadai, prioritas anggaran.

No.	Peneliti/Judul/Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				meneliti objek penelitian secara alamiah.	
6.	Judul : Implementasi Kebijakan Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik di Kota Semarang Peneliti : Michial Vitaloka, DC Kuswardani, Adijati Utaminingsih Tahun : 2023	tujuan pada penelitian ini adalah menginvestigasi implementasi kebijakan penggunaan kantong plastik di toko retail di Kota Semarang dan menggali dampak serta implikasinya.	kebijakan penggunaan kantong plastik di toko retail di Kota Semarang telah memberikan dampak positif dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghasilkan penghematan biaya, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pelestarian lingkungan. kebijakan ini berdampak positif dalam penghematan biaya bagi toko retail. Pengurangan penggunaan kantong plastik juga berkontribusi pada pengurangan biaya pembelian	Dalam penelitian kualitatif , peneliti lebih fokus pada eksplorasi dan pemahaman subjektif tentang fenomena sosial. Oleh karena itu, penggunaan metode penelitian kualitatif akan sangat membantu dalam mengungkapkan detail dan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial yang dikaji. Penelitian	Berdasarkan analisis yang dilakukan, beberapa kesimpulan dapat diambil 1. implementasi kebijakan penggunaan kantong plastik di toko retail di Kota Semarang telah berhasil mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai secara signifikan. Data menunjukkan penurunan jumlah kantong plastik yang diberikan kepada pelanggan, menandakan bahwa kebijakan ini mampu mendorong perubahan pola perilaku konsumen dan pedagang dalam

No.	Peneliti/Judul/Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			kantong plastik sekali pakai dan mendorong pemanfaatan alternatif, dampak lingkungan dari implementasi kebijakan ini terlihat dari pengurangan limbah plastik yang dihasilkan. Penelitian ini telah menggali persepsi konsumen terhadap kebijakan penggunaan kantong plastik, namun perlu pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan atau penerimaan konsumen terhadap alternatif plastik.	ini menggunakan metode studi kasus ganda, merupakan metode penelitian kualitatif yang melibatkan analisis mendalam terhadap beberapa kasus atau entitas yang berbeda untuk memahami fenomena atau masalah tertentu dari perspektif yang beragam. Dalam metode ini, peneliti memilih beberapa kasus yang dianggap mewakili variasi yang relevan dalam konteks penelitian.	meminimalkan penggunaan plastik. 2. kebijakan ini juga berdampak positif Dalam penghematan biaya bagi toko retail. Pengurangan penggunaan kantong plastik berkontribusi pada pengurangan biaya pembelian kantong plastik sekali pakai dan mendorong pemanfaatan alternatif seperti tas belanja yang dapat digunakan ulang. Dampak ini memberikan insentif bagi toko retail untuk mengadopsi praktik bisnis yang lebih berkelanjutan secara finansial. 3. dampak lingkungan dari implementasi kebijakan ini

No.	Peneliti/Judul/Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
					terlihat dari pengurangan limbah plastik yang dihasilkan. Dengan mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai, kebijakan ini memiliki potensi untuk mengurangi risiko pencemaran lingkungan, mengurangi tekanan pada daur ulang, dan mendukung konservasi ekosistem dan fauna laut
7.	Judul : Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Siak(Studi Pada Kawasan Objek Wisata, Pasar Tradisional dan Kantor Pemerintah)	Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mengetahui serta menganalisa implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan mengetahui apa saja yang menjadi	implementasi yang digunakan adalah implementasi MSN-Approach dari Yulianto Kadji (2015) yang melihat implementasi dari tiga pendekatan yaitu pendekatan mentalitas, pendekatan sistem dan pendekatan	metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif . Data-data yang diperlukan baik data primer maupun data sekunder diperoleh dengan teknik observasi ,	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : pertama, implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Siak belum berjalan optimal. Kedua, faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut yaitu Sosialisasi

No.	Peneliti/Judul/Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Peneliti : Novela Lestari, Hasim As'ari Tahun : 2022	faktor faktor penghambat dari implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik pada kawasan objek wisata, pasar tradisional dan kantor pemerintah di Kabupaten Siak.	jejaring kerjasama	wawancara dan dokumentasi.	yang belum menyeluruh, hadirnya pedagang kaki lima yang tidak tertib, tidak ada pemberian sanksi bagi pelanggar, dan kebiasaan masyarakat yang sulit diubah
8.	Judul : Implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Denpasar Peneliti : Yohanes Kopong Blolo Tahun : 2021	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam mengurangi penggunaan kantong plastik di Kota Denpasar. Penelitian ini dilakukan di Kota Denpasar karena adanya Peraturan Walikota Denpasar No. 36/2018.	Studi ini menggunakan pandangan Makmur dan Thahier (2016) tentang faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018. 1. Materi Kebijakan Publik	Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Pendekatan ini menganalisis kinerja kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Pemilihan informan	Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksana mengingatkan dan membagikan tas ramah lingkungan. Telah terjadi komunikasi dan sosialisasi kebijakan regulasi. Komunikasi internal pelaksana sangat baik dalam mensosialisasikan kebijakan. Kelompok sasaran mendukung aturan tersebut, sehingga pelaksanaan kebijakan berjalan dengan lancar dan sesuai

No.	Peneliti/Judul/Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			2. Biaya Implementasi Kebijakan Publik 3. Komunikasi Kebijakan Publik 4. Implementor Kebijakan Publik 5. Kelompok Sasaran Kebijakan Publik 6. Struktur Birokrasi 7. Kondisi Politik dan Ekonomi 8. Kondisi Keamanan dan Budaya	menggunakan metode purposive sampling. Responden adalah petugas DLHK Kota Denpasar dan informan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada informan yang ditentukan berdasarkan kebutuhan penelitian ini. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan penyajian data dan penarikan kesimpulan.	ekspektasi. Ruang politik dan ekonomi membantu melaksanakan kebijakan ini. Keamanan dan budaya Bali memfasilitasi implementasi kebijakan.

No.	Peneliti/Judul/Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
9.	Judul : Program Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Pucang Anom Kota Surabaya dalam Pandangan Implementasi Kebijakan Peneliti : Salsabila Erdian Mawardani, Lukman Arif Tahun : 2023	Penelitian ini mempunyai tujuan mengetahui program pengurangan penggunaan kantong plastik di Pasar Pucang Anom Kota Surabaya.	implementasi George C. Edward III dalam Sahya Anggara, yang di dalamnya mempunyai 4 fokus dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yang terdiri dari Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.	Penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah milik Miles and Huberman (2014:8).	Berdasarkan hasil observasi pada lokus Pasar Pucang Anom masih didapati permasalahan kantong belanja tidak ramah lingkungan. Hal tersebut terjadi karena komunikasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya bersama dengan petugas pengelola pasar Pucang Anom belum berjalan dengan optimal Sumber daya, Belum berjalan dengan optimal, karena kurangnya petugas dalam mengawasi 4 objek Disposisi, dilaksanakan cukup baik dalam kognisinya, namun dalam intensitas respon masih belum terlaksana dengan baik Struktur Birokrasi, Tugas pokok dan fungsinya sudah berjalan dengan optimal sesuai dengan ketentuan, dalam SOP sudah berjalan dengan baik sesuai aturannya meskipun masih kurang

No.	Peneliti/Judul/Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
					tepat waktu dalam pelaksanaan pemberian sanksi.
10.	Judul : Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bogor No 61 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bogor Peneliti : Siti Shopiatul Islami, Irma Purnamasari, G. Goris Seran Tahun : 2020	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bogor	Penelitian ini menggunakan ambiguitas-konflik implementasi kebijakan dari Richard E. Matland yang mencakup empat dimensi, yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan.	Metode penelitian bersifat deskriptif-kualitatif . Responden penelitian adalah pegawai Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dan 19 Pusat Perbelanjaan dan Pertokoan Modern di Kota Bogor. Instrumen utama pengumpulan data adalah kuesioner, yang kemudian dibantu dengan wawancara, pengamatan dan pustaka/dokumenta si. Data yang telah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bogor adalah baik. Hal ini dapat dilihat dari penerapan program yang berjalan sesuai aturan dan angka penurunan penggunaan kantong plastik yang signifikan. Implementasi kebijakan peraturan ini menunjukkan administrative implementation, dimana terdapat tingkat ambiguitas yang rendah dan tingkat konflik yang rendah di antara pelaksana kebijakan, sasaran kebijakan dan masyarakat pengguna. Namun ditemukan masih sangat rendahnya

No.	Peneliti/Judul/Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				dikumpulkan dianalisis dengan rumus Weight Mean Score untuk mendapatkan skor rerata.	pemahaman masyarakat mengenai lingkungan.

Sumber : Hasil Analisis, 2024

1.6.1 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Murdyansyah Herman, Maliki Aji Prakoso, Bambang Agus Windusancono, Muhammad Daennie (2023)

Penelitian ini secara signifikan memberikan kebaruan dibandingkan studi sebelumnya tentang implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Jepara. Perbedaan utama terletak pada fokus geografis; sementara penelitian yang ada berpusat pada Kabupaten Jepara, studi saya secara eksklusif menyoroti Kota Semarang. Pergeseran lokasi ini memungkinkan analisis kontekstual yang mendalam tentang bagaimana kebijakan pengendalian plastik diterapkan dan dampaknya di lingkungan perkotaan yang berbeda, dengan dinamika sosial, ekonomi, dan birokrasi yang unik di Kota Semarang. Selain itu, penelitian saya memiliki cakupan yang lebih luas dalam hal jenis penggunaan plastik yang diteliti dan dampaknya. Judul penelitian saya, "Pengendalian Penggunaan Plastik pada Keseimbangan Lingkungan Hidup," menunjukkan bahwa studi ini tidak hanya terbatas pada kantong plastik seperti yang dibahas dalam jurnal tentang Jepara. Sebaliknya, penelitian saya akan menggali berbagai bentuk penggunaan plastik dan meninjau dampaknya secara lebih komprehensif terhadap keseimbangan lingkungan hidup secara keseluruhan, yang dapat mencakup aspek-aspek seperti pencemaran air, tanah, dan udara, serta keanekaragaman hayati di Kota Semarang

2. Penelitian Normajatun, Abdul Haliq (2020)

Penelitian saya berlokasi di Kota Semarang, yang memiliki karakteristik perkotaan, demografi, dan struktur pemerintahan yang berbeda dengan Kota

Banjarmasin. Perbedaan konteks ini sangat krusial dalam memahami bagaimana kebijakan pengendalian plastik diterapkan dan respons masyarakat serta pelaku usaha terhadapnya. Implementasi kebijakan di Semarang mungkin menghadapi tantangan dan peluang yang unik dibandingkan dengan Banjarmasin, sehingga penelitian ini akan memberikan wawasan baru yang spesifik. Poin paling krusial dari kebaruan penelitian saya adalah penekanan pada "keseimbangan lingkungan hidup." Jurnal yang diberikan berfokus pada implementasi kebijakan itu sendiri. Penelitian saya, di sisi lain, bertujuan untuk menganalisis tidak hanya implementasi kebijakan tetapi juga bagaimana implementasi tersebut berdampak pada keseimbangan lingkungan hidup di Kota Semarang. Ini berarti penelitian saya akan mencoba mengukur atau setidaknya mengidentifikasi indikator-indikator perubahan positif atau negatif pada lingkungan akibat dari kebijakan pengendalian plastik tersebut, yang mungkin tidak menjadi fokus utama dari studi pembandingan. Hal ini menambahkan dimensi evaluasi dampak yang lebih dalam.

3. Penelitian Ni Wayan Sintya Galuh Paramita, Amrie Firmansyah (2024)

Penelitian saya menghadirkan kebaruan yang substansial dibandingkan dengan kajian yang menganalisis efektivitas kebijakan plastik berbayar di Indonesia secara umum. Meskipun jurnal tersebut memberikan gambaran makro tentang kebijakan plastik berbayar dan dampaknya terhadap pencemaran sampah plastik di tingkat nasional. Judul penelitian saya, "Implementasi Kebijakan Mengenai Pengendalian Penggunaan Plastik," menunjukkan bahwa fokusnya tidak terbatas hanya pada aspek 'plastik berbayar' seperti yang disoroti dalam jurnal. Kebijakan pengendalian plastik bisa mencakup berbagai instrumen (misalnya, larangan

penggunaan plastik sekali pakai tertentu, insentif daur ulang, edukasi, dll.) yang mungkin diterapkan di Semarang. Ini berarti penelitian saya akan meninjau spektrum kebijakan yang lebih luas dalam upaya mengendalikan penggunaan plastik, bukan hanya satu jenis kebijakan spesifik.

4. Penelitian Ira Anggita Puspitaningrum (2021)

Penelitian yang dilakukan Ira Anggita Puspitaningrum memiliki fokus yang sangat spesifik dan terlokalisasi, yaitu di Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Ini adalah studi kasus yang mendalam di tingkat mikro. Sebaliknya, penelitian saya memiliki cakupan geografis yang lebih luas yaitu seluruh Kota Semarang. Ini memungkinkan analisis implementasi kebijakan yang lebih menyeluruh di berbagai wilayah Kota Semarang, termasuk area perkotaan, permukiman, dan mungkin sektor-sektor yang berbeda (misalnya, ritel modern, pasar tradisional, atau bahkan institusi), yang mungkin memiliki karakteristik dan tantangan implementasi yang bervariasi. Penelitian saya dapat menangkap gambaran yang lebih representatif tentang bagaimana kebijakan Perwal Semarang No. 27 Tahun 2019 diterapkan di seluruh kota.

5. Penelitian Gabriel Lintang Adrianto (2022)

Meskipun penelitian yang dilakukan oleh Gabriel Lintang Adrianto sama-sama berfokus pada implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Plastik, penelitian saya membawa kebaruan yang signifikan melalui pendekatan dan cakupan yang berbeda. Penelitian yang dilakukan secara eksplisit menyatakan tujuannya untuk melihat bagaimana implementasi Perwal tersebut bertujuan "untuk mengurangi timbulan sampah plastik di Kota Semarang."

Meskipun ini adalah tujuan yang krusial, penelitian saya melangkah lebih jauh dengan menganalisis dampak implementasi kebijakan pada "Keseimbangan Lingkungan Hidup Kota Semarang." Ini adalah perbedaan fundamental. Keseimbangan lingkungan hidup memiliki cakupan yang lebih luas dan mendalam daripada sekadar pengurangan timbulan sampah.

6. Penelitian Michial Vitaloka, DC Kuswardani, Adijati Utaminingsih (2023)

Penelitian yang dilakukan Michial Vitaloka, DC Kuswardani, Adijati Utaminingsih sama-sama mengkaji implementasi kebijakan pengendalian plastik di Kota Semarang, sedangkan penelitian saya menawarkan kebaruan yang signifikan melalui fokus dan tujuan yang lebih luas dan mendalam. Penelitian yang dilakukan spesifik berfokus pada "Implementasi Kebijakan Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik di Kota Semarang." Ini adalah fokus yang spesifik dan terbatas pada satu jenis produk plastik. Sebaliknya, penelitian saya menggunakan frasa "Pengendalian Penggunaan Plastik" secara umum. Ini menunjukkan bahwa studi saya memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada kantong plastik, tetapi berpotensi mencakup berbagai jenis produk plastik sekali pakai lainnya (misalnya, sedotan, styrofoam, kemasan makanan/minuman, botol plastik) yang juga diatur dalam kebijakan pengendalian plastik di Semarang. Ini akan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang upaya pengendalian plastik di kota.

7. Penelitian Novela Lestari, Hasim As'ari (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Novela Lestari, Hasim As'ari mengkaji implementasi kebijakan pengurangan penggunaan plastik, sedangkan penelitian saya menawarkan kebaruan yang signifikan melalui perbedaan fokus geografis dan tujuan yang lebih luas dan fundamental. Penelitian yang dilakukan secara spesifik berfokus pada "penggunaan kantong plastik." Sementara itu, penelitian saya menggunakan frasa "Pengendalian Penggunaan Plastik." Hal ini mengindikasikan bahwa studi saya memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada kantong plastik, tetapi berpotensi mencakup berbagai jenis produk plastik sekali pakai lainnya (misalnya, sedotan, styrofoam, kemasan, botol) yang mungkin menjadi target kebijakan di Kota Semarang. Ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang upaya pengendalian semua jenis plastik di kota tersebut.

8. Penelitian Yohanes Kopong Blolo (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Kopong Blolo mengkaji implementasi kebijakan pengurangan penggunaan plastik, sedangkan penelitian saya menawarkan kebaruan yang signifikan melalui perbedaan fokus geografis dan, yang terpenting, tujuan yang lebih luas dan fundamental. Penelitian yang dilakukan secara spesifik berfokus pada "pengurangan penggunaan kantong plastik." Ini adalah fokus yang spesifik pada satu jenis produk plastik. Sebaliknya, penelitian saya menggunakan frasa "Pengendalian Penggunaan Plastik" secara umum. Ini menunjukkan bahwa studi saya memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada kantong plastik, tetapi berpotensi mencakup berbagai jenis produk plastik sekali pakai lainnya (misalnya, sedotan, styrofoam, kemasan makanan/minuman, botol plastik) yang juga menjadi target kebijakan pengendalian

plastik di Kota Semarang. Ini akan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang upaya pengendalian semua jenis plastik di kota tersebut, mencerminkan kompleksitas masalah sampah plastik secara keseluruhan.

9. Penelitian Salsabila Erdian Mawardani, Lukman Arif (2023)

Penelitian yang dilakukan Salsabila Erdian Mawardani, Lukman Arif mengkaji implementasi kebijakan pengurangan penggunaan plastik, sedangkan penelitian saya menawarkan kebaruan yang signifikan melalui beberapa aspek yang berbeda. Penelitian yang dilakukan secara spesifik berfokus pada "pengurangan penggunaan kantong plastik." Ini adalah fokus yang spesifik pada satu jenis produk plastik. Sebaliknya, penelitian saya menggunakan frasa "Pengendalian Penggunaan Plastik" secara umum. Ini menunjukkan bahwa studi saya memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada kantong plastik, tetapi berpotensi mencakup berbagai jenis produk plastik sekali pakai lainnya (misalnya, sedotan, styrofoam, kemasan makanan/minuman, botol plastik) yang juga menjadi target kebijakan pengendalian plastik di Kota Semarang. Ini akan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan holistik tentang upaya pengendalian semua jenis plastik di kota tersebut, mencerminkan kompleksitas masalah sampah plastik secara keseluruhan.

10. Penelitian Siti Shopiatul Islami, Irma Purnamasari, G. Goris Seran (2020)

Penelitian yang dilakukan Siti Shopiatul Islami, Irma Purnamasari, G. Goris Seran sama-sama mengkaji implementasi kebijakan pengurangan penggunaan plastik di tingkat kota, sedangkan penelitian saya menghadirkan kebaruan yang signifikan melalui perbedaan fokus geografis dan, yang terpenting, cakupan tujuan

yang lebih luas dan fundamental. Penelitian yang dilakukan secara spesifik berfokus pada "pengurangan penggunaan kantong plastik." Ini adalah fokus yang spesifik pada satu jenis produk plastik. Sebaliknya, penelitian saya menggunakan frasa "Pengendalian Penggunaan Plastik" secara umum. Ini menunjukkan bahwa studi saya memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada kantong plastik, tetapi berpotensi mencakup berbagai jenis produk plastik sekali pakai lainnya (misalnya, sedotan, styrofoam, kemasan makanan/minuman, botol plastik) yang juga menjadi target kebijakan pengendalian plastik di Kota Semarang (seperti Perwal Semarang No. 27 Tahun 2019 yang lebih luas cakupannya). Ini akan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan holistik tentang upaya pengendalian semua jenis plastik di kota tersebut, mencerminkan kompleksitas masalah sampah plastik secara keseluruhan.

1.7 Kajian Pustaka

1.7.1 Administrasi Publik

Secara etimologis, kata "administrasi" berasal dari bahasa Latin, yakni gabungan dari "*ad*" dan "*ministrate*," yang masing-masing berarti menuju dan "melayani." Dalam bahasa Inggris, istilah ini menjadi "*administration*," yang menurut Atmosudirjo (dalam Sellang, 2019) mencerminkan serangkaian kegiatan yang mencakup pemberian bantuan, kepemimpinan, pelaksanaan, dan pengelolaan. Intinya, administrasi mencerminkan proses pengarahan dan pengorganisasian aktivitas guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, istilah "publik" berasal dari bahasa Inggris "*public*," yang menunjuk pada sesuatu yang bersifat umum, menyangkut masyarakat luas, atau berkaitan langsung dengan negara dan pemerintahan.

Administrasi publik menggambarkan peran pemerintah sebagai aktor sentral atau pengatur yang memiliki peran aktif dan inisiatif dalam menetapkan atau menjalankan kebijakan yang dipandang perlu dan menguntungkan bagi masyarakat (Keban, 2014). Pandangan ini berangkat dari anggapan bahwa masyarakat bersifat pasif, memiliki keterbatasan kemampuan, serta harus mengikuti dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Nicholas Henry, administrasi publik merupakan perpaduan yang rumit antara aspek teoretis dan praktis yang bertujuan untuk meningkatkan respons kebijakan publik terhadap dinamika kebutuhan sosial, serta membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai relasi antara pemerintah dan warga negara. Secara umum, berbagai sudut pandang tersebut menegaskan bahwa administrasi publik mencakup proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya memenuhi kepentingan publik melalui perumusan dan implementasi kebijakan secara efektif.

Berdasarkan berbagai perspektif tersebut, administrasi publik dapat dipahami sebagai suatu aktivitas yang berorientasi pada pemecahan persoalan publik melalui peningkatan kinerja organisasi, pengelolaan sumber daya manusia, dan keuangan, guna menunjang tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan.

1.7.2 Paradigma Administrasi Publik

Administrasi Publik berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di mana pun, terutama dalam memberikan pelayanan publik untuk mewujudkan tujuan utama negara, yaitu kebahagiaan masyarakat. Dalam konteks Indonesia misalnya, tujuan dari dibentuknya pemerintahan sebagaimana termaktub dalam

pembukaan Undang- Undang Dasar (UUD) 1945 diantaranya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Paradigma administrasi publik merupakan pola pikir yang membentuk bagaimana administrasi publik dipahami dan dijalankan dalam beragam situasi, yang terus berkembang seiring waktu dengan penekanan yang bervariasi pada aspek fokus, tempat (lokus), dan orientasi tujuan. Menurut Nicholas Henry (1995), terdapat enam paradigma dalam administrasi publik yang dirumuskan berdasarkan titik perhatian utama serta konteks institusionalnya, yakni:

1. Dikotomi politik dan administrasi (1900- 1926)

Lokus, yang merujuk pada letak otoritas pemerintahan dalam sistem negara bagian, menjadi pusat perhatian utama dalam paradigma ini. Dalam kerangka administrasi publik, pemerintah memegang dua peran mendasar, yakni peran politik dan peran administratif. Peran politik berkaitan erat dengan tanggung jawab pemerintah dalam merumuskan kebijakan atau memenuhi kepentingan negara, sementara peran administratif berfokus pada pelaksanaan kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan. Kedua peran ini dipisahkan secara fungsional..

2. Prinsip-prinsip administrasi (1927-1937)

Salah satu konsep administrasi publik yang paling dikenal dikembangkan oleh Gullick dan Urwick, yang dirumuskan dalam akronim POSDCORB, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran. Dalam paradigma ini, fokus analisis lebih dititikberatkan pada tujuan dan fungsi (fokus) dibandingkan dengan lokasi atau konteks institusional (lokus). Prinsip-prinsip administrasi yang berkembang saat ini

memperlihatkan bahwa konsep tersebut dapat diaplikasikan dalam berbagai sistem administrasi, tanpa terikat secara kaku pada bentuk organisasi, lingkungan kerja, misi, atau struktur kelembagaan, sembari memberikan arah dalam perbaikan kinerja publik..

3. Administrasi Negara sebagai ilmu politik (1950-1970)

Paradigma ini secara eksplisit menaruh perhatian pada lokus berupa birokrasi pemerintahan dan hanya mencakup ranah-ranah tertentu yang dianggap relevan. Di dalamnya terdapat upaya untuk menafsirkan ulang hubungan antara ilmu politik dan manajemen pemerintahan.

4. Administrasi Negara sebagai manajemen (1954-1970)

Paradigma ini lahir sebagai bentuk kritik terhadap paradigma sebelumnya yang memposisikan administrasi negara hanya sebagai turunan dari ilmu politik. Dalam pencarian pendekatan alternatif, administrasi publik kemudian ditempatkan sebagai disiplin utama yang berdiri sendiri dan menjadi poros keilmuan baru yang diutamakan.

5. Administrasi Negara sebagai administrasi negara (1970- sekarang)

Fokus utama paradigma ini terletak pada keterkaitan antara tempat beroperasinya institusi negara (lokus) dan substansi dari tugas-tugas pemerintahan (fokus). Bidang kajian seperti organisasi, implementasi kebijakan publik, praktik administrasi, dan strategi manajerial menjadi sorotan dalam pengembangan keilmuan ini. Saat ini, lokus normatif dalam paradigma tersebut berpusat pada isu-isu publik dan birokrasi pemerintahan.

6. Governance (1990-sekarang)

Paradigma terkini menunjukkan adanya pergeseran menuju proses pemerintahan yang lebih modern dan partisipatif. Dalam pembuatan kebijakan publik, aktor yang terlibat tidak terbatas pada para pemegang kekuasaan formal, tetapi juga mencakup warga negara dan kelompok masyarakat. Terjalin hubungan kolaboratif antara pemerintah dan sektor lainnya dalam penyediaan layanan publik, di mana peran pemerintah bertransformasi menjadi fasilitator dan pengarah dalam penyelenggaraan negara.

1.7.3 Manajemen Publik

Menurut Overman yang dikutip dalam Pasolong (2017), manajemen publik merupakan bidang kajian interdisipliner yang memadukan berbagai fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dengan pemanfaatan sumber daya, termasuk sumber daya manusia, keuangan, aset fisik, informasi, serta dinamika politik. Pendekatan ini menggarisbawahi tingginya kompleksitas dalam mengelola organisasi sektor publik yang melibatkan berbagai unsur tersebut.

Lingkup pemerintahan mencakup manajemen publik merujuk pada serangkaian upaya sistematis untuk mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan oleh lembaga pemerintahan. Proses ini menggambarkan efektivitas pengelolaan dalam manajemen publik, yang meliputi tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan (Keban, 2014).

Manajemen publik menjadi pijakan konseptual dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang efisien. Dalam konteks penelitian ini, peran kepemimpinan inovatif, kualitas aparatur, serta kapasitas untuk mengembangkan

inovasi pelayanan publik, merupakan bagian integral dari manajemen kapasitas dalam sektor publik. Lahirnya konsep manajemen publik sendiri berangkat dari gagasan bahwa organisasi sektor publik harus dijalankan secara profesional oleh manajemen publik. Dalam hal ini, manajer publik berfungsi sebagai aktor kunci dalam mengkoordinasikan berbagai aspek organisasi. Oleh sebab itu, studi mengenai bagaimana individu mengelola organisasi dalam sektor publik dikenal sebagai manajemen publik. Fokus kajiannya tidak hanya terbatas pada pengelolaan internal organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, tetapi juga mencakup sensitivitas terhadap faktor eksternal, seperti kebijakan publik dan dinamika kepentingan politik, yang senantiasa mempengaruhi jalannya organisasi sektor publik.

1.7.4 Kebijakan Publik

Konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah policy. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J. Frederick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan

terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih menjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40- 50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan;
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi;
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan;
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan;
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai;
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit;
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu;
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar-organisasi dan yang bersifat intra organisasi;

- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah; dan
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Riant Nugroho (2021), proses perencanaan kebijakan (policy planning) sebagian besar yakni sekitar 60% berpusat pada tahap implementasi, sementara 20% berkaitan dengan capaian hasil, dan 20% sisanya menyangkut pengawasan pelaksanaan kebijakan. Tahapan implementasi dianggap sebagai fase yang paling kompleks karena sering kali realitas pelaksanaan di lapangan tidak sejalan dengan perancangan konseptual awal. Untuk mencapai efektivitas implementasi kebijakan, terdapat lima aspek utama yang harus diperhatikan:

1. Ketepatan kebijakan

Keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh akurasi dalam menjawab persoalan publik serta kesesuaian dengan kewenangan lembaga-lembaga yang terlibat. Ketepatan ini akan menentukan apakah kebijakan tersebut mampu menghadirkan dampak positif bagi masyarakat.

2. Ketepatan pelaksana

Pelaksanaan kebijakan tidak semata menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai penerima manfaat. Tiap aktor memiliki peran strategis sesuai fungsi dan kepentingannya masing-masing.

3. Ketepatan Target

Keakuratan kebijakan terhadap targetnya dipengaruhi oleh tiga hal: kemungkinan adanya tumpang tindih atau intervensi kebijakan lain, kesiapan pihak

yang menjadi sasaran implementasi, serta kemampuan kebijakan tersebut dalam mereformasi atau menggantikan kebijakan sebelumnya.

4. Ketepatan lingkungan

Kebijakan dipengaruhi oleh dua jenis lingkungan, yaitu lingkungan internal (kebijakan itu sendiri) yang mencakup interaksi antara aktor-aktor seperti pembuat kebijakan, pelaksana, dan lembaga pendukung, serta lingkungan eksternal, yang melibatkan opini publik, media massa, kelompok kepentingan, dan tokoh-tokoh yang berperan dalam membentuk persepsi dan arah implementasi.

5. Ketepatan proses

Agar kebijakan dapat diterima dan dijalankan secara optimal, diperlukan pemahaman bersama antara pemerintah sebagai penggagas dan pelaksana kebijakan dengan masyarakat sebagai subjek yang terdampak. Pemerintah berperan tidak hanya dalam merancang dan melaksanakan, tetapi juga memastikan keberlangsungan pengawasan terhadap implementasi di lapangan.

1.7.5 Tahapan Kebijakan

Kebijakan publik dirancang sebagai instrumen untuk mengatasi berbagai persoalan publik secara tepat guna dan efisien, termasuk persoalan kekerasan. Penyusunannya melalui proses yang sistematis dan bertahap guna menghasilkan kebijakan yang dapat diterima oleh publik. Salah satu tokoh yang menguraikan tahapan-tahapan tersebut adalah James Anderson (Subarsono, 2012), yang menyatakan bahwa proses perumusan kebijakan publik terdiri atas lima tahap utama, yaitu:

1. Identifikasi Masalah yakni tahap mengenali dan menganalisis isu-isu strategis beserta akar penyebabnya untuk kemudian dijadikan dasar dalam penetapan agenda kebijakan;
2. Perumusan Alternatif Kebijakan mencakup pengembangan pilihan solusi dan pelibatan berbagai aktor yang memiliki kepentingan dalam proses penyusunan kebijakan;
3. Penetapan Kebijakan berupa pemilihan opsi kebijakan terbaik dengan mempertimbangkan kriteria, substansi kebijakan, dan mekanisme pelaksanaannya;
4. Implementasi Kebijakan meliputi penerapan kebijakan oleh para pelaksana lapangan, bentuk tindakan yang dilakukan, serta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat; dan
5. Evaluasi Kebijakan berupa pengukuran sejauh mana kebijakan mencapai tujuannya, penilaian terhadap efektivitas kebijakan, serta kemungkinan revisi atau pembatalan apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Keberhasilan suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh efektivitas proses implementasinya yang harus berjalan sesuai prosedur baku dan bebas dari intervensi kepentingan individu maupun kelompok tertentu. Dalam konteks ini, fokus penelitian diarahkan pada proses Implementasi Kebijakan Mengenai Pengendalian Penggunaan Plastik pada Keseimbangan Lingkungan Hidup Kota Semarang.

1.7.6 Implementasi Kebijakan

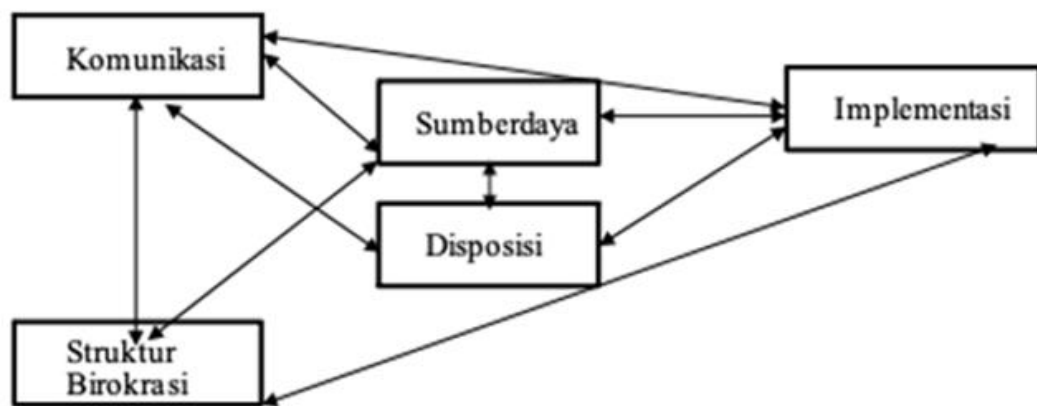
Menurut Rodiyah et al. (2022), pelaksanaan kebijakan merupakan bagian yang sangat penting dalam siklus kebijakan publik. Jika tahap ini tidak dilakukan secara maksimal, maka akan menyulitkan pencapaian hasil kebijakan. Implementasi merupakan fase di mana suatu kebijakan dapat mewujudkan tujuannya apabila dijalankan dengan efektif. Van Meter dan Van Horn (dalam Najikhah et al., 2021) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan mencakup segala tindakan yang diambil oleh pihak pemerintah maupun swasta untuk merealisasikan tujuan yang telah ditentukan.

Sementara itu, Mazmanian dan Sabatier (dalam Najikhah et al., 2021) menekankan bahwa implementasi perlu dilihat dari dampak yang muncul di masyarakat setelah kebijakan tersebut diterapkan, baik berupa dampak yang bersifat positif maupun negatif. Oleh sebab itu, implementasi dapat dimaknai sebagai aktivitas konkret dari aktor kebijakan dalam mengoperasionalkan hasil perumusan kebijakan guna memberikan pengaruh terhadap kelompok sasaran. Selanjutnya, Pressman dan Wildavsky (dalam Nafisa et al., 2023) menjelaskan bahwa implementasi adalah proses menjalankan isi kebijakan, merealisasikan komitmen yang termuat dalam dokumen kebijakan, serta menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan merupakan rangkaian tindakan dan upaya yang dilakukan oleh institusi publik maupun swasta untuk merealisasikan sasaran kebijakan. Proses ini juga mencakup evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kebijakan di lapangan sesuai dengan rancangan awalnya.

1.7.7 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Setelah melewati proses perumusan, kebijakan publik memasuki tahap implementasi. Namun, pelaksanaan kebijakan kerap kali menghadapi sejumlah faktor yang dapat berperan sebagai pendorong maupun penghambat keberhasilan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan implementasi kebijakan dari George Edwards III, yang mengemukakan bahwa terdapat empat faktor utama yang menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan, yakni:



Gambar 1. 2 Implementasi George Edward III

Sumber: Edward III (1980: 148) dalam Syahrudin (2018)

1. Komunikasi

Komunikasi mengacu pada proses penyampaian informasi kebijakan kepada kelompok sasaran dan masyarakat luas, serta melibatkan tanggapan dan tindakan para aktor yang terlibat. Faktor ini dianggap berjalan efektif apabila para pelaksana memahami secara menyeluruh maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Dalam konteks organisasi, komunikasi merupakan proses yang kompleks, dan kegagalan dalam menyampaikan informasi secara memadai dapat berdampak signifikan terhadap keberhasilan implementasi. Komunikasi sendiri memiliki

beberapa dimensi penting, yaitu transmisi (penyampaian pesan), kejelasan isi pesan, dan konsistensi dalam penyampaian.

2. Sumber Daya

Sumber daya meliputi berbagai komponen yang menunjang pelaksanaan kebijakan, seperti jumlah tenaga kerja, tingkat pengalaman staf pelaksana, kewenangan formal yang memungkinkan jalannya program, ketersediaan fasilitas pendukung, pendanaan yang memadai, sarana fisik, serta informasi yang relevan. Dengan kata lain, sumber daya mencakup aspek manusia, keuangan, infrastruktur, dan informasi yang saling terintegrasi dalam mendukung jalannya kebijakan publik.

3. Disposisi

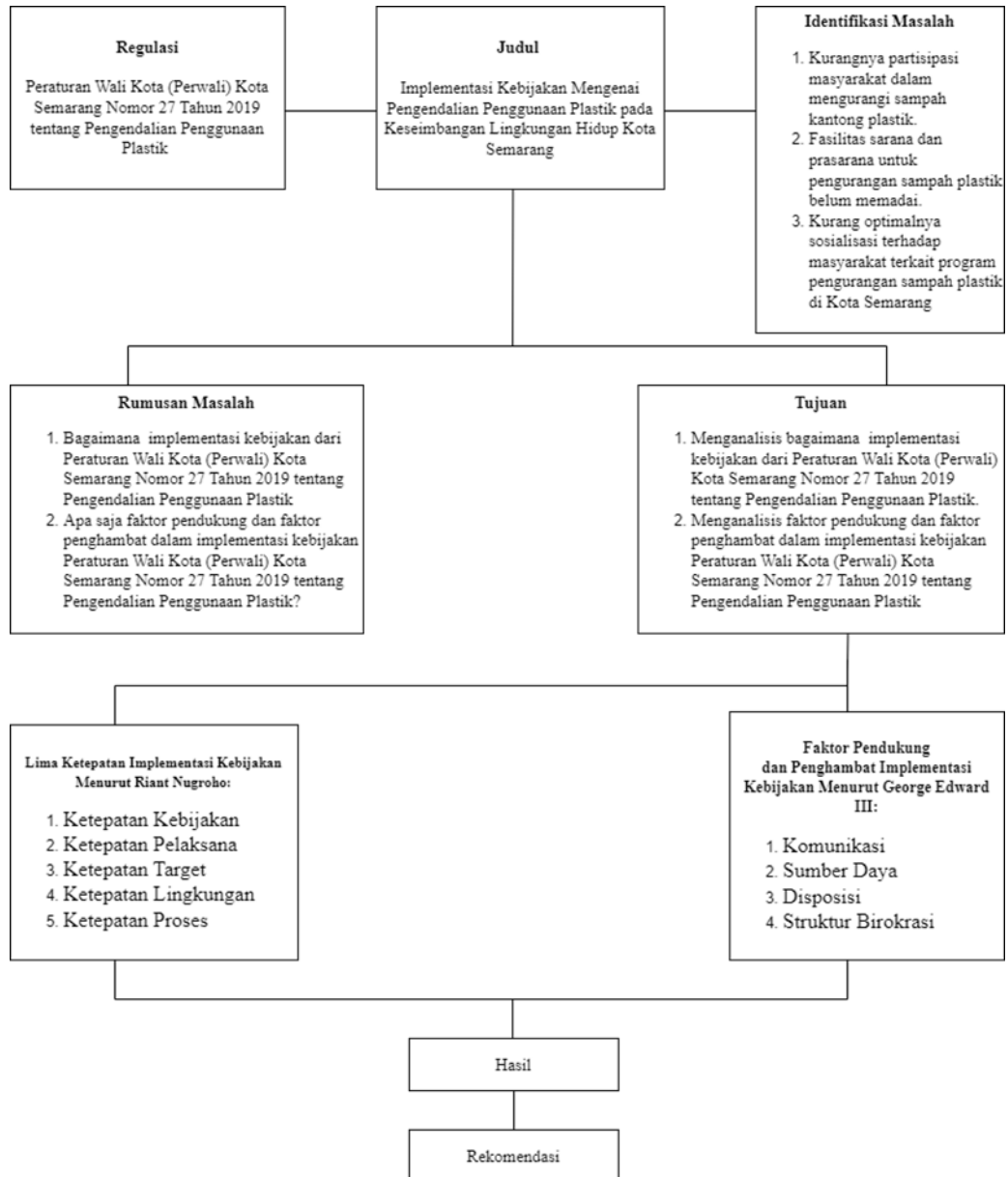
Disposisi merujuk pada kesediaan dan komitmen individu atau kelompok pelaksana dalam melaksanakan kebijakan. Respons terhadap kebijakan ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk: tingkat pemahaman, kesediaan mengikuti arahan, serta intensitas dukungan atau penolakan. Beberapa hal yang mempengaruhi disposisi antara lain proses rekrutmen birokrasi dan pemberian insentif yang dapat memotivasi pelaksana untuk menjalankan kebijakan secara optimal.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merujuk pada sistem organisasi dan tata kelola institusi yang menjadi pelaksana kebijakan publik. Salah satu tantangan utama dalam birokrasi adalah menghindari terjadinya fragmentasi, yang dapat melemahkan efektivitas implementasi. Koordinasi lintas unit sangat diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan lancar dan para manajer memahami peran serta langkah

yang harus diambil. Dua karakteristik utama dari birokrasi dalam konteks ini adalah keberadaan Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure/SOP) dan potensi terjadinya fragmentasi kelembagaan.

1.8 Kerangka Berpikir



1.9 Operasionalisasi Konsep

19.1 Implementasi kebijakan dari Peraturan Wali Kota (Perwali) Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik

Implementasi kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik merupakan proses pelaksanaan kebijakan publik yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai melalui pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan penegakan aturan terhadap masyarakat dan pelaku usaha. Implementasi kebijakan ini mencerminkan sejauh mana kebijakan dapat dijalankan secara efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses implementasi kebijakan ini terdiri dari beberapa dimensi atau gejala yang menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan di lapangan, yaitu:

1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan adalah kesesuaian antara isi, tujuan, dan substansi Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 dengan permasalahan penggunaan plastik sekali pakai yang terjadi di Kota Semarang. Dimensi ini menilai apakah kebijakan yang dirumuskan telah menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan pelaku usaha serta relevan dengan kondisi lingkungan setempat. Gejala yang dapat dilihat dari sub fenomena ini yaitu:

- a) Kesesuaian latar belakang kebijakan dengan permasalahan sampah plastik di Kota Semarang.
- b) Kejelasan tujuan kebijakan dalam mengendalikan penggunaan plastik sekali pakai.

- c) Kesesuaian jenis plastik yang dilarang (kantong plastik, pipet plastik, dan styrofoam) dengan sumber utama pencemar lingkungan.
- d) Relevansi substansi kebijakan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
- e) Ketepatan pengaturan sanksi administratif dalam mendorong kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Ketepatan pelaksanaan adalah kesesuaian antara pelaksanaan kebijakan di lapangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019. Dimensi ini menilai peran, kapasitas, serta koordinasi para pelaksana kebijakan dalam menjalankan pengendalian penggunaan plastik. Gejala yang dapat dilihat dari sub fenomena ini yaitu:

- a) Kejelasan peran dan tanggung jawab dinas atau instansi pelaksana kebijakan.
- b) Ketersediaan personel, anggaran, dan sarana pendukung pelaksanaan kebijakan.
- c) Efektivitas koordinasi antar instansi pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas lingkungan.
- d) Kemampuan pelaksana dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha.
- e) Tidak adanya tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan.

3. Ketepatan Target

Ketepatan target adalah kesesuaian antara sasaran kebijakan dengan kelompok yang menjadi pengguna utama plastik sekali pakai, yaitu pelaku usaha dan masyarakat. Dimensi ini menilai sejauh mana kebijakan mampu menjangkau, memengaruhi, dan mengubah perilaku kelompok sasaran. Gejala yang dapat dilihat dari sub fenomena ini yaitu:

- a) Kejelasan kelompok sasaran kebijakan (pelaku usaha dan masyarakat).
- b) Tingkat pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap kebijakan pengendalian plastik.
- c) Tingkat kepatuhan terhadap larangan penggunaan plastik sekali pakai.
- d) Perubahan perilaku dalam penggunaan alternatif ramah lingkungan.
- e) Dampak kebijakan terhadap aktivitas ekonomi pelaku usaha, khususnya UMKM.

4. Ketepatan Proses

Ketepatan proses adalah kesesuaian tahapan pelaksanaan kebijakan, mulai dari sosialisasi, pengawasan, penegakan aturan, hingga evaluasi kebijakan, dengan prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan. Gejala yang dapat dilihat dari sub fenomena ini yaitu:

- a) Keberlangsungan dan pemerataan proses sosialisasi kebijakan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
- b) Kesesuaian pelaksanaan kebijakan di lapangan dengan ketentuan Perwali.
- c) Efektivitas pengawasan terhadap pelanggaran penggunaan plastik sekali pakai.
- d) Konsistensi penerapan sanksi administratif.

- e) Adanya evaluasi kebijakan secara berkala oleh pemerintah daerah.

5. Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan adalah kesesuaian antara kebijakan dengan kondisi lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Kota Semarang yang memengaruhi penerimaan dan keberlanjutan implementasi kebijakan. Gejala yang dapat dilihat dari sub fenomena ini yaitu:

- a) Dukungan masyarakat dan pelaku usaha terhadap kebijakan pengendalian plastik.
- b) Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengurangi penggunaan plastik.
- c) Pengaruh kondisi sosial, budaya, dan ekonomi terhadap penerimaan kebijakan.
- d) Kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- e) Perubahan kondisi lingkungan seperti kebersihan dan pengurangan sampah plastik.

1.9.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik

Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengendalian penggunaan plastik adalah berbagai kondisi yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Faktor-faktor ini menentukan sejauh mana kebijakan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Faktor pendukung dan penghambat terdiri dari beberapa gejala sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat dan pelaku usaha secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami. Komunikasi yang efektif menjadi faktor pendukung, sedangkan komunikasi yang lemah dapat menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan.

Gejala yang dapat dilihat dari sub fenomena ini yaitu:

- a) Kejelasan pesan kebijakan yang disampaikan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
- b) Keseragaman informasi mengenai isi dan tujuan kebijakan.
- c) Intensitas dan jangkauan sosialisasi kebijakan.
- d) Adanya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, serta dukungan teknis dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian plastik. Gejala yang dapat dilihat dari sub fenomena ini yaitu:

- a) Ketersediaan tenaga pelaksana yang memadai.
- b) Dukungan anggaran untuk sosialisasi, pengawasan, dan penegakan aturan.
- c) Ketersediaan fasilitas dan sarana pendukung pelaksanaan kebijakan.
- d) Dukungan dari sektor swasta dan masyarakat dalam membantu pelaksanaan kebijakan.

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap, komitmen, dan kemauan para pelaksana kebijakan, pelaku usaha, serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik. Gejala yang dapat dilihat dari sub fenomena ini yaitu:

- a) Komitmen pelaksana kebijakan dalam menegakkan peraturan.
- b) Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap dampak plastik.
- c) Sikap pelaku usaha terhadap kebijakan pengendalian plastik.
- d) Persepsi masyarakat terhadap niat dan konsistensi pemerintah.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah pola koordinasi, mekanisme kerja, dan prosedur birokrasi yang mengatur pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik. Gejala yang dapat dilihat dari sub fenomena ini yaitu:

- a) Kejelasan pembagian tugas dan kewenangan antar instansi.
- b) Kesederhanaan atau kerumitan prosedur birokrasi.
- c) Efektivitas koordinasi antar instansi terkait.
- d) Keberadaan SOP sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan.

1.10 Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada prosedur pelaksanaan riset yang menjelaskan langkah-langkah kerja, rentang waktu, sumber data atau informasi, serta teknik pengumpulan dan pengolahan data. Rancangan penelitian disusun untuk memilih metode yang paling sesuai guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan oleh peneliti.

1.10.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan informasi secara mendalam. Pendekatan ini dipilih guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang dikaji. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Sugiyono, 2013), penelitian kualitatif merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memahami makna dari fenomena yang terjadi, dengan memanfaatkan berbagai metode yang tersedia dalam tradisi kualitatif. Adapun desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk mencatat, menguraikan, menganalisis, serta menginterpretasikan situasi atau kondisi yang tengah berlangsung. Desain ini diterapkan untuk mengkaji secara sistematis Implementasi Kebijakan Mengenai Pengendalian Penggunaan Plastik pada Keseimbangan Lingkungan Hidup Kota Semarang.

1.10.2 Lokus dan Fokus Penelitian

Lokus dalam penelitian ini mengacu pada tempat penelitian akan dilakukan. Peneliti memilih lokus penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang berdasarkan kepada data yang menunjukkan dampak lingkungan yang terjadi di Kota Semarang sejak diterapkannya Peraturan Walikota No. 27 Tahun 2019, khususnya dalam pengurangan penggunaan plastik. Kemudian, fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisis terhadap implementasi kebijakan mengenai pengendalian penggunaan plastik pada keseimbangan lingkungan hidup Kota Semarang; dan

2. Melakukan analisis terhadap infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan mengenai pengendalian penggunaan plastik pada keseimbangan lingkungan hidup Kota Semarang.

1.10.3 Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan subjek sebagai sumber utama untuk memperoleh data dan informasi, sehingga dibutuhkan keberadaan informan. Informan sendiri merupakan individu atau kelompok yang dapat memberikan keterangan terkait isu yang diteliti. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling, yakni dengan menetapkan kriteria tertentu pada calon informan yang dianggap memiliki pemahaman mendalam terhadap permasalahan, memiliki data yang relevan dan akurat, serta mampu memberikan jawaban yang valid. Selanjutnya, digunakan juga teknik snowball sampling, yaitu metode pengambilan sampel di mana setiap informan yang telah dipilih memiliki peluang yang sama untuk merekomendasikan informan lain yang relevan sebagai responden tambahan.

1.10.4 Jenis dan Sumber Data

Peneliti memanfaatkan data berjenis kualitatif karena data tersebut dapat disusun secara kategoris berdasarkan atribut dan sifat dari fenomena yang diteliti dan data ini didapatkan dari hasil wawancara secara mendalam terkait narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini, observasi langsung ke lapangan, serta dokumentasi.

Peneliti tertarik menggunakan dua sumber data dalam tahapan ini yaitu primer yang didapatkan melalui Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan

Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Sedangkan untuk data kedua menggunakan data sekunder yang didapatkan dari jurnal ilmiah, laman milik pemerintah Jawa Tengah, berita nasional maupun RPJMD atau RPJP Pemerintah Kota Semarang.

- a. Data Primer merupakan sebuah sumber data yang di mana diperoleh secara langsung kepada pihak yang mengumpulkan data. Umumnya jenis data ini didapatkan melalui kegiatan wawancara kepada sejumlah sumber yang terpercaya.
- b. Data Sekunder merupakan suatu sumber data yang di mana perolehannya secara tidak langsung, contohnya melalui perantara pihak ketiga atau berdasarkan penganalisisan dokumen yang telah tersedia. Data sekunder yang dikumpulkan oleh peneliti ialah berdasarkan literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkaitan dengan penelitian tengah berlangsung.

1.10.5 Teknik Pengumpulan Data

Terkait tahapan ini, peneliti nantinya akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara secara mendalam kepada pihak data primer, observasi, dan dokumentasi secara langsung ke lapangan.

1. Teknik wawancara

Menurut Pasolong, wawancara merupakan suatu proses interaksi yang melibatkan dua pihak, yakni pihak yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang memberikan jawaban, yang selanjutnya disebut sebagai informan atau narasumber. Proses wawancara dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun tidak

langsung (melalui media komunikasi). Dalam konteks penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, termasuk kepada tim pelaksana yang terdiri dari pengarah tim, ketua tim, sekretariat, bendahara, serta beberapa anggota lainnya.

2. Teknik Pengamatan/Observasi

Pasolong menjelaskan bahwa observasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung dan sistematis terhadap fenomena atau objek penelitian. Apabila pelaksanaannya sesuai dengan tujuan dan rancangan penelitian, serta didukung dengan pencatatan yang tertib dan mampu menjaga tingkat reliabilitas serta validitas, maka data yang diperoleh melalui metode ini dapat dianggap sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumen dipahami sebagai kumpulan data atau informasi yang tercatat, tergambar, atau terekam dalam berbagai bentuk. Melalui studi dokumentasi, data yang dikumpulkan dari hasil observasi dan wawancara dapat diperkaya dan divalidasi dengan informasi tertulis yang tersedia, sehingga mendukung kelengkapan dan ketepatan hasil penelitian secara menyeluruh.

1.10.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan proses mengelola dan mengolah informasi yang telah dikumpulkan agar tersusun secara sistematis dalam bentuk pola atau kategori tertentu, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang mudah dipahami, baik oleh peneliti sendiri maupun oleh pihak lain. Dalam kegiatan wawancara, peneliti akan

menelaah setiap jawaban yang diberikan oleh informan. Jika ditemukan jawaban yang kurang memadai, peneliti akan mengajukan pertanyaan lanjutan guna memperoleh informasi yang lebih akurat. Hal serupa juga diterapkan terhadap data hasil observasi lapangan dan dokumen yang telah dikumpulkan. Semua data tersebut kemudian dianalisis guna menemukan jawaban atas permasalahan yang dikaji. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data menurut Miles dan Huberman, yang melibatkan tiga tahapan utama, yaitu:

a. Reduksi data

Pada tahap ini, data hasil observasi, wawancara, dan dokumen dikumpulkan, diseleksi, serta diolah agar menghasilkan informasi yang lebih terfokus dan relevan. Reduksi data berarti merangkum, menyortir, dan memusatkan perhatian hanya pada aspek-aspek penting. Tahap ini membantu peneliti dalam memahami fenomena secara lebih jelas, menyusun penyajian data secara efisien, serta mengidentifikasi data tambahan yang mungkin masih dibutuhkan.

b. Penyajian data

Penyajian dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk naratif atau deskriptif, yang dapat diperkuat dengan bantuan tabel, grafik, diagram, dan bentuk visual lainnya agar informasi lebih mudah dipahami. Melalui tahap ini, peneliti dapat menentukan langkah-langkah lanjutan berdasarkan temuan yang telah tersusun.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Setelah data disajikan dan pola-pola mulai terlihat, peneliti melakukan penarikan kesimpulan yang bersifat sementara maupun final. Verifikasi dilakukan

untuk memastikan apakah data yang dimiliki cukup kuat untuk mendukung kesimpulan yang dibuat. Jika belum, maka diperlukan penguatan data lanjutan; jika sudah, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap sah dan terpercaya.

1.10.7 Kualitas dan Validitas Data

Pengujian kualitas dan validitas data perlu dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian memiliki kualitas yang memadai. Menurut Gibbs (2007, dalam Creswell, 2010), validitas dalam penelitian kualitatif adalah proses untuk menilai akurasi atau keabsahan temuan melalui metode tertentu. Dalam studi ini, pengujian kualitas data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan metode untuk memverifikasi keabsahan data yang dikumpulkan dan dianalisis dengan cara melihatnya dari berbagai sudut pandang, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan bias. Lebih lanjut, Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi sumber, yaitu pengujian keabsahan data yang diperoleh dari berbagai sumber informasi.
2. Triangulasi teknik, yakni verifikasi data dari satu sumber yang sama menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda.
3. Triangulasi waktu, yaitu pengujian keabsahan data dari sumber yang sama tetapi dikumpulkan pada waktu yang berbeda.